

## SISTEM AKUNTANSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Oleh : Parno\*

*Abstract*; Zakat institution is an institution that is in the middle so that the public has demanded transparency and accountability. In carrying out its activities as amyl, zakat organizations have principles that must be adhered to, including zakat organization must have a system of accounting and financial management, audit, and publication. By applying the principles of the organization's financial statements will be achieved in accordance with the zakat accounting standards.

**Kata Kunci** : Lembaga zakat, transparansi, akuntabilitas, standar akuntansi zakat

### A. Pendahuluan

Kesuksesan berjalannya perusahaan diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya oleh perusahaan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut perludanya kerjasama yang saling menguntungkan antara *stakeholders* dengan pengelola dana. Pemilik modal (*shareholders*) mempercayakan aset yang dimilikinya untuk dikelola oleh manajemen untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Untuk keberlanjutan kerjasama antara pemodal dan pengelola perlu ada alat pengawasan yang bisa digunakan oleh pemilik untuk melihat kinerja manajemen.

*Corporate governance* merupakan kata lain untuk *accountability*<sup>1</sup>. Hal ini merefleksikan bahwa manajemen harus akuntabel terhadap *shareholders* dan penyedia pendanaan lain serta memiliki struktur yang tepat untuk menjamin *accountability*. Masalah akuntabilitas mulai banyak dibicarakan semenjak munculnya kasus Enron Corporation<sup>2</sup> Enron yang merupakan salah satu dari sepuluh perusahaan terbesar di Amerika dinyatakan bangkrut oleh pengadilan setempat. Kebangkrutan Enron ini tidak bisa terlepas dari kegagalan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan. Selain itu kasus Enron ini juga melibatkan Arthur Andersen yang juga sebagai akuntan Enron. Lewis mengungkapkan bahwa akuntabilitas merupakan pusat dari Islam (*central to Islam*). Bahkan konsep akuntabilitas dalam Islam lebih luas cakupannya daripada konsep akuntabilitas dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya akuntabilitas kepada *stakeholders* saja tetapi juga kepada Allah dan masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang berdasarkan syariah (*comprehensive ethic*) mengatur cara yang lebih spesifik bagaimana kegiatan komersial dibentuk, bagaimana bisnis harus diorganisasi dan diatur dan bagaimana laporan keuangan harus dibuat.<sup>3</sup>

Artikel ini berfokus pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai OPZ di Indonesia yang menerapkan *Good Corporate Governance*. Selain itu, OPZ seharusnya melaksanakan *corporate culture* yang dijalankan berdasarkan budaya Islam, yakni *The Celestial Management*. Pendekatan budaya sangat penting bagi akuntabilitas perusahaan, karena budaya yang baik merupakan sistem pengendalian yang efektif.<sup>4</sup> Budaya Islam sangat

---

\* Dosen Tetap Jurusan Syariah STAIN Samarinda

1 Al-Jahri, M.A. 2000. *Issues of Corporate Governance In Islamic Financial Institutions* . Makalah Presentasi dalam Conference on Corporate Governance and Risk Management In Islamic Financial Institutions, (Beirut, 21-22 Maret 2000)

2 J. Solomon. *Corporate Governance and Accountability*. (England: John Wiley & Sons, Ltd, 2007), p.11

3 Lewis, M.K.. *Accountability and Islam*. Paper disajikan pada Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition, (Adelaide 10-12 April 2006

4 Krismiaji. *Sistem Informasi Akuntansi*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h.18

mendukung terciptanya akuntabilitas<sup>5</sup>. Artikel ini akan menjawab bagaimana budaya Islam yang seharusnya dijalankan oleh OPZ dan bagaimana budaya Islam mampu meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan OPZ.

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (*amanah*) dari para *muzaki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien<sup>6</sup>. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusikannya zakat dengan baik. Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari *muzaki* baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.<sup>7</sup>

Lembaga zakat adalah lembaga yang berada di tengah-tengah publik sehingga dituntut memiliki transparansi dan akuntabilitas. Gray, Owen dan Mounders mendefinisikan akuntabilitas sebagai *the onus requirement or responsibility to provide account (by no means necessarily a financial account) for reckoning of action of which one is held responsible*.<sup>8</sup> Di sini *principal* dalam konteks pengelolaan keuangan zakat adalah pemberi amanah (*muzaki*) dan Tuhan. Ini berarti bahwa manajemen pengelola (*agent*) harus mempertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya kepada kedua pihak di atas. Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai *amil*, organisasi pengelola zakat mempunyai prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, diantaranya organisasi pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, audit, serta publikasi.<sup>9</sup> Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat harus transparan dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan dalam proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data menjadi laporan keuangan.

Membahas mengenai sistem akuntansi organisasi pengelola zakat tentu tidak lepas dari teori asimetri informasi (*information asymetry*) yang berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai akuntabilitas dan aksesibilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

<sup>5</sup> Asri, M. dan M. Fahmi. *Contribution of the Islamic Worldview Towards Corporate Governance*.

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 8 UU. *Tentang Pengelolaan Zakat*. (Jakarta : Fokus Media, 2011), h.21

<sup>7</sup> Muhammad Akhyar Adnan. *Buku Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. (Jakarta: Institut Manajemen Zakat (IMZ). 2001). h.4

<sup>8</sup> Rob Gray & David L. Owen. Keith Moulder, *Accountability, Corporate Social Reporting and the Social Audit*. Journal of Business, Finance, and Accounting (Spring :1990), p. 39 -50.

<sup>9</sup> Rifqi Muhammad. *Akuntabilitas Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 7 No. 1, 2006)

## B. Pembahasan

### 1. Tujuan Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat

Untuk mencapai pengelolaan yang akuntabilitas dan aksesibilitas pengelolaan organisasi zakat dalam hal pelaporan keuangan, maka organisasi pengelola zakat harus membangun sistem akuntansi organisasi pengelola zakat yang mempunyai tujuan utama untuk :<sup>10</sup>

- a. Membantu memperlancar pelaksanaan tugas manajemen
- b. Meningkatkan efisien dan efektivitas kerja
- c. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- d. Meningkatkan akuntabilitas finansial
- e. Meningkatkan asset organisasi

### 2. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Istilah Pengendalian internal diambil dari terjemahan istilah “*Internal Control*”. Sebagaimana diketahui bahwa definisi pengendalian intern yang dikemukakan *Commite on Auditing Procedur American Institute of Carified Public Accountant (ICPA)* sebagaimana dikutip oleh Hartadi adalah sebagai berikut “sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan<sup>11</sup>. Kemudian Hartanto memberikan penjelasan tentang pengendalian intern dengan membedakan ke dalam arti yang sempit dan dalam arti luas secara lengkap disebutkan : dalam arti sempit : Pengendalian intern disamakan dengan “*internal check*” yang merupakan prosedur-prosedur mekanisme untuk memeriksa ketelitian dari data-data administrasi, seperti mencocokkan penjumlahan horizontal dengan penjumlahan vertikal. Dalam arti luas: Pengendalian intern dapat disamakan dengan *manajemen control*, yaitu suatu sistem yang meliputi semua cara-cara yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi/mengendalikan perusahaan. Dalam pengertian pengendalian intern meliputi : Struktur Organisasi, formulir-formulir dan prosedur pembukuan dan laporan (administrasi), *budget* dan standar pemeriksaan intern dan sebagainya<sup>12</sup>. Sedangkan Zaki Baridwan juga dapat mengartikan pengendalian intern sebagai berikut : Pengendalian Intern meliputi rencana organisasi dan metode serta kebijaksanaan yang terkoordinir dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, menguji ketepatan dan sampai berapa jauh data akuntansi dapat dipercayai, menggalakkan efisiensi usaha dan dapat mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang telah digaris bawahi<sup>13</sup>. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern didefinisikan sebagai berikut: Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta : P3EI Pres. 2009). h.19

<sup>11</sup> Bambang Hartadi, *Auditing : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan Edisi 1*, (Yogyakarta : BPFE. 1987), h. 121

<sup>12</sup> D. Hartanto, *Akuntansi Untuk Usahawan Edisi Kelima*, (Jakarta : LPFE-UI, 1997), h. 25

<sup>13</sup> Zaki Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta : BPFE. 1994), h.97

<sup>14</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Profesional Akuntan Publik*. (Jakarta: Salemba Empat. 2001).

Pengembangan sistem akuntansi harus mempertimbangkan sistem pengendalian internal (SPI) organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang bagus. Elemen sistem pengendalian intern antara lain :<sup>15</sup>

- a. Adanya struktur organisasi dan pegawai yang kompeten
  - b. Adanya sistem dan prosedur akuntansi
  - c. Adanya sistem otorisasi
  - d. Adanya formulir, dokumen, dan catatan akuntansi
  - e. Adanya pemisahan tugas
  - f. Adanya praktik yang sehat.
3. Struktur Organisasi dan Pegawai yang Kompeten
- Pengendalian internal yang baik mensyaratkan adanya struktur organisasi yang menunjukkan kejelasan garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian. Selain itu, keberadaan struktur organisasi tersebut harus ditunjang oleh pegawai yang kompeten, professional, amanah, dan berakhlak mulia. Dengan kata lain pegawai pegawai yang akan menjalankan organisasi harus bersifat *shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah*.
4. Sistem dan Prosedur Akuntansi
- Sistem dan prosedur akuntansi merupakan serangkaian tahap dan langkah-langkah sistematis yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi meliputi : sistem dan prosedur penerimaan kas, sistem dan prosedur pengeluaran kas, sistem dan prosedur akuntansi aset tetap, dan sistem dan prosedur akuntansi selain kas.
5. Sistem Otorisasi
- Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di organisasi. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir, dokumen transaksi, dan laporan tertentu. Sistem otorisasi menentukan apakah suatu transaksi dapat diproses atau tidak. Jika suatu transaksi tidak mendapat otorisasi dari orang yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun tetap dilakukan maka transaksi tersebut dikategorisasikan tidak sah dan illegal. Sistem otorisasi dalam pengelolaan keuangan organisasi pengelola zakat meliputi pengaturan tentang :<sup>16</sup>
- a. Pejabat yang berwenang menandatangani cek dan bukti pengeluaran kas
  - b. Pejabat yang berwenang mengesahkan laporan pertanggungjawaban
  - c. Pejabat yang berwenang menerima dan mengeluarkan kas
  - d. Pejabat yang berwenang menandatangani bukti penerimaan zakat, infak dan sedekah.
  - e. Pejabat yang berwenang menandatangani bukti penyaluran zakat, infak dan sedekah.
6. Formulir, Dokumen, dan Catatan Akuntansi
- Setiap transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti transaksi yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan. Auditor dalam melakukan pemeriksaan keuangan akan menguji laporan keuangan dan melacaknya hingga ke dokumen sumber. Formulir dan

<sup>15</sup> Wijaya Tunggal Amin. *Internal Auditing*. (Jakarta. Penerbit Havarindo. 2000), h.32

<sup>16</sup> Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, h.21

dokumen transaksi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat antara lain :<sup>17</sup>

- 1) Transaksi penerimaan kas
  - a. Kwitansi penerimaan zakat, infak dan sedekah
  - b. Bukti transfer bank (slip/setoran/kiriman uang) dari *muzakki*
  - c. Rekening koran bank
  - d. *Print out* buku tabungan
  - e. Bukti pelunasan piutang
  - f. Dokumen pinjaman
  - g. Tanda terima lainnya
- 2) Transaksi pengeluaran kas
  - a. Bukti pengeluaran kas
  - b. Bukti transaksi dari pihak ketiga misalnya faktur, tagihan dan sebagainya
  - c. Register cek
  - d. Bukti transfer
  - e. Bukti pelunasan uang
  - f. Bukti pengeluaran lainnya
- 3) Transaksi pendistribusian zakat, infak dan sedekah
  - a. Bukti penerimaan zakat, infak dan sedekah yang tanda tangani *mustahik*
  - b. Bukti acara serah terima bantuan
  - c. Bukti penyaluran zakat, infak dan sedekah lainnya
- 4) Transaksi pembelian
  - a. Surat order pembelian
  - b. Faktur dari pemasok
  - c. Bukti pembelian lainnya
- 5) Transaksi selain kas
  - a. Bukti memorial
  - b. Berita acara
  - c. Bukti lainnya

Buku catatan akuntansi yang digunakan antara lain meliputi :

- 1) Buku Jurnal
  - a. Jurnal umum
  - b. Jurnal penerimaan kas
  - c. Jurnal pengeluaran kas
- 2) Buku Besar
- 3) Buku Pembantu
  - a. Buku kas umum
  - b. Buku register cek
  - c. Buku rekapitulasi penerimaan ZIS
  - d. Buku rekapitulasi penyaluran ZIS
  - e. Buku pembantu bank
  - f. Buku pembantu persediaan
  - g. Buku pembantu asset tetap
  - h. Buku pembantu piutang
  - i. Buku pembantu lainnya

#### 7. Pemisahan Tugas

Elemen penting pengendalian internal yang juga perlu diperhatikan oleh organisasi pengelola zakat adalah adanya pemisahan tugas. Suatu transaksi dari awal

---

<sup>17</sup> Ibid. h.22

hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang uang (bendahara) dengan pencatat pembukuan (akuntansi) serta pengotorisasi. Pemisahan tugas diperlukan untuk menjamin dilakukannya mekanisme *check and balance*, yaitu agar masing-masing fungsi atau bagian saling mengontrol dan mengawasi.

#### 8. Praktik yang Sehat

Adanya struktur organisasi, sistem dan prosedur akuntansi, dan pemisahan tugas harus diikuti dengan dilakukannya praktik yang sehat dalam menjalankan organisasi. Beberapa cara yang perlu dilakukan organisasi pengelola zakat untuk menciptakan praktik yang sehat antara lain :<sup>18</sup>

- a. Menggunakan formulir/dokumen bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
- b. Dilakukannya pemeriksaan rutin dan pemeriksaan insidental.
- c. Dilakukannya rotasi kerja untuk para pegawai.
- d. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal hingga akhir oleh satu orang saja tanpa melibatkan orang lain.
- e. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatan misalnya *cash opname*, *stock opname*, dan pemeriksaan aset tetap.
- f. Dibentuk unit pengawas internal (*internal audit*) untuk menjamin dilaksanakannya sistem pengendalian internal organisasi.

### C. Standar Akuntansi Zakat

Sistem akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sinkron dengan standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.<sup>19</sup> Apa saja jenis laporan keuangan yang harus disajikan, apa saja elemen atau isi laporan keuangan, bagaimana format pelaporannya, dan kebijakan akuntansi merupakan hal-hal yang diatur dalam standar akuntansi zakat.

Tujuan utama standar akuntansi adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji laporan dengan pembaca laporan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan keuangan dapat memiliki daya banding (*comparability*). Dengan adanya standar akuntansi, maka pelaporan keuangan menjadi lebih berkualitas. Selain itu dengan adanya standar akuntansi, maka dapat dilakukan perbandingan kinerja antar kurun waktu dan dengan organisasi sejenis lainnya. Standar akuntansi zakat juga menjadi dasar bagi auditor dalam proses audit, karena pada dasarnya audit adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat manajemen organisasi pengelola zakat apakah sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi zakat yang telah ditetapkan.

### D. Penutup

Organisasi pengelola zakat harus menyajikan laporan zakat untuk publik, pengelola menjadi lebih amanah dan masyarakat (*muzaki*) menjadi percaya pada lembaga yang

<sup>18</sup> Ibid, h.23

<sup>19</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Profesional Akuntan Publik*, h.14

bersangkutan. Organisasi pengelola membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, amanah dan mempunyai nilai akuntabilitas yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka organisasi pengelola zakat harus menerapkan sistem akuntansi zakat dan wajib menerapkan standar akuntansi zakat yaitu PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar. 2001. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat (IMZ)
- Al-Jahri, M.A. 2000. *Issues of Corporate Governance In Islamic Financial Institutions*. Makalah Presentasi dalam Conference on Corporate Governance and Risk Management In Islamic Financial Institutions, (Beirut, 21-22 Maret 2000)
- Asri, M. dan M. Fahmi. *Contribution of the Islamic Worldview Towards Corporate Governance*.
- Baridwan, Zaki. 1994. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta : BPFE
- D. Hartanto, 1997. *Akuntansi Untuk Usahawan*, Edisi Kelima. Jakarta : LPFE-UI
- Gray, Rob, David L. Owen. Keith Moulder. 1991. *Accountability, Corporate Social Reporting and the Social Audit*. Journal of Business, Finance, and Accounting (Spring).
- Hartadi, Bambang, 1987. *Auditing : Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan*. Edisi 1, Yogyakarta : BPFE
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 Tentang Akuntansi Zakat*. Jakarta : IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta. Salemba Empat
- J. Solomon. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. England: John Wiley & Sons, Ltd
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Lewis, M.K. *Accountability and Islam*. Paper disajikan pada Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition, Adelaide 10-12 April 2006
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta : P3EI Press
- Muhammad, Rifqi. 2006. *Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 7 No. 1
- Undang-Undang RI No. Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 8 UU. *Tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta : Fokus Media
- Wijaya Tunggal Amin. 2000. *Internal Auditing*. Jakarta. Penerbit Havarindo